

TERBENTUKNYA PROVINSI BANTEN DINAMIKA PEMERINTAHAN DI BANTEN, TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK, HEGEMONI SELAMA REFORMASI HINGGA KEKINIAN

Agus Rustamana¹, Muhammad Ilham Satia Utama², Alyqa Putri Syahlawwatansyah³,
Ratu Alfiani Zikriyah⁴, Alfi Ameilia⁵

Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: * agusrustamana@untirta.ac.id¹, satiaoetama07@gmail.com², aliqaputrisy@gmail.com³,
ratualfianidzikriyah@gmail.com⁴, alfiameilia60@gmail.com⁵

ABSTRAK

Jurnal ini membahas bagaimana pembentukan provinsi Banten yang merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat, melalui UU No. 23 Tahun 2000, yang dipicu aspirasi historis, budaya, dan ekonomi pasca-Reformasi 1998. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui *library research* membahas kesultanan banten, proses pemekaran dan implikasinya dengan munculnya dinasti politik keluarga Ratu Atut Choisyah yang Dimana dinasti ini didukung oleh partai Golkar, menciptakan Hegemoni ala Gramsci yang mandominasi dan mempertahankan kekuasaan meskipun di sertai korupsi. Korupsi tersebut berdampak pada sistem pembangunan yang ketimpangan di berbagai daerah di Banten. Pada Pilkada 2024 adanya tanda-tanda penurunan dinasti atutdengan munculnya dinasti Dimyati yang Dimana menunjukkan bahwa Masyarakat semakin kritis terhadap kontradiksi Daerahnya. Dengan ini kita dapat mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan sebagai Masyarakat Banten agar tidak terjadi hala serupa.

Kata kunci

Pembentukan Banten, Otonomi daerah, dinasti, korupsi

ABSTRACT

This journal discusses how the province of Banten was formed as a result of the division of West Java Province through Law No. 23 of 2000, which was triggered by historical, cultural, and economic aspirations after the 1998 Reformation. Using a qualitative case study approach through library research, it discusses the Banten Sultanate, the division process and its implications with the emergence of the political dynasty of the Ratu Atut Choisyah family, which was supported by the Golkar party, creating a Gramsci-style hegemony that dominated and maintained power despite being accompanied by corruption. This corruption has impacted the development system, causing inequality in various regions in Banten. In the 2024 regional elections, there are signs of a decline in the Atut dynasty with the emergence of the Dimyati dynasty, which shows that the community is becoming more critical of the contradictions in their region. With this, we can identify what needs to be improved as the people of Banten so that similar things do not happen again.

Keywords

Formation of Banten, regional autonomy, dynasty, corruption

1. PENDAHULUAN

Provinsi Banten adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Sebelum adanya Provinsi Banten, Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Provinsi ini dipisahkan dan terbentuklah Provinsi Banten, dengan Pusat pemerintahannya yang berada di Kota Serang. Provinsi ini mempunyai beberapa kabupaten/kota, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang ditambah Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang selatan. Aktivitas ekonomi dan sumber daya di masing-masing Kabupaten/kota itu berbeda-beda. Banten yang terletak di daerah paling ujung barat Pulau Jawa, dengan luas wilayah 8.800,83 km dan jumlah penduduk 8.529.799 jiwa berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Iwan Ridwan, 2021).

Dalam perkembangannya, politik lokal Banten menunjukkan pola kekuasaan yang khas, termasuk kemunculan dinasti politik yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Dinasti politik di Banten berakar pada praktik familisme dan strategi kontrol politik yang memanfaatkan jejaring kekuasaan keluarga, serta rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam proses elektoral. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi dinamika kekuasaan lokal, tetapi juga menciptakan struktur oligarki yang memainkan peran penting dalam kontestasi politik dan proses pengambilan kebijakan daerah (Isnanto, 2023).

Berdasarkan pandangan Politik dinasti menurut para ahli “istilah dinasti politik menunjuk pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal lebih dari satu generasi” (Querubin 2010:2) dan “menyatakan politik dinasti memiliki keunggulan dalam pemilihan umum karena popularitas, talenta, kekayaan dan berbagai hal lain terkait kesuksesan politik yang telah diturunkan antargenerasi” (Querubin 2011). Menurut Martien Herna (2017), Politik Dinasti dan Dinasti Politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik Dinasti merupakan sebuah proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan, sedangkan dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah keturunan dari beberapa orang.

Secara keseluruhan, dinamika politik dan pembangunan di Banten mencerminkan interaksi antara faktor sejarah, struktur sosial, dan praktik politik kontemporer. Kondisi ini menjadikan Banten sebagai contoh penting dalam kajian politik lokal di Indonesia, terutama terkait isu dinasti politik, tata kelola pemerintahan daerah, serta tantangan pemerataan pembangunan di era desentralisasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, dipilih karna bertujuan untuk memahami secara mendalam dan juga pendekatan studi perpustakaan (library research). Penelitian kualitatif ini mengumpulkan dan menganalisis data yang sudah ada untuk berfokus pada pemahaman makna, konteks dan pengalaman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Terbentuknya Provinsi Banten Dinamika Pemerintahan Di Banten

a. Aspirasi Pemekaran Provinsi Banten:

Banten memiliki identitas kuat sebagai kesultanan bersejarah (sejak abad ke-16 di bawah Sultan Ageng Tirtayasa), yang pernah menjadi pusat perdagangan dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Namun, pasca-kemerdekaan Indonesia, wilayah ini terintegrasi ke Provinsi Jawa Barat (sejak 1950), yang menyebabkan marginalisasi budaya dan ekonomi Banten. Pada era Orde Baru (1966–1998), aspirasi pemekaran muncul karena ketidakpuasan terhadap dominasi Jawa Barat. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh seperti Tubagus Chasan Sochib (Gubernur Banten sementara) dan didukung oleh kelompok masyarakat adat serta ulama pesantren (misalnya dari Banten Selatan). Faktor pendorong: Ketimpangan pembangunan (Banten hanya mendapat 20-30% anggaran dari Jabar), isu identitas budaya (seratwayang dan tradisi Sunda vs. Banten), serta tekanan pasca-reformasi untuk desentralisasi kekuasaan.

b. Proses Pemekaran Provinsi Banten (1998–2000)

Pasca-lengsernya Soeharto pada 1998, gelombang pemekaran daerah meledak sebagai respons terhadap tuntutan demokrasi. Banten menjadi salah satu yang pertama disetujui melalui UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Prosesnya dimulai dengan Dekrit Presiden Habibie (1998) yang membuka ruang aspirasi daerah. Pada 1999, DPR RI membahas RUU Pemda, dan Banten diresmikan pada 2 Oktober 2000 dengan ibu kota Serang. Wilayahnya mencakup 4 kabupaten dan 4 kota (saat itu), dengan luas 9.662 km² dan populasi sekitar 8 juta jiwa. Tantangan awal: Konflik dengan Jawa Barat soal batas wilayah (misalnya Lebak dan Pandeglang), serta isu keuangan (Banten awalnya bergantung subsidi pusat). Djoko Widodo (Gubernur pertama) memimpin transisi, tapi segera muncul elite lokal yang memanfaatkan momen ini.

c. Implikasi Terhadap Dinasti Politik Lokal:

Pemekaran menciptakan ruang bagi elite lokal untuk membentuk dinasti politik. Sari menganalisis bagaimana keluarga-keluarga seperti keluarga Rano Karno (aktor dan politisi PDI-P) dan elite pesantren (misalnya keturunan Mbah Tubagus) mendominasi pilkada sejak 2001. Contohnya Pada pilgub 2006, Ratu Atut Chosiyah (dari keluarga elite Serang) terpilih sebagai gubernur perempuan pertama, membentuk dinasti yang berlanjut hingga 2014 (meski terhenti karena kasus korupsi). Ini mencerminkan hegemoni "oligarki patrimonial" di mana kekuasaan diwariskan melalui jaringan keluarga, patronase, dan pengaruh budaya (seperti dukungan ormas Islam).

Dampak negatif: Dinasti ini menghambat demokrasi substantif, menyebabkan korupsi (kasus e-KTP Banten 2013) dan ketergantungan pada pusat. Namun, positifnya, pemekaran meningkatkan pembangunan infrastruktur (misalnya Pelabuhan Merak dan Tol Jakarta-Merak). Hingga 2022 (saat artikel ditulis), hegemoni ini berlanjut dengan aktor seperti Wahidin Halim (pilgub 2017–2022), yang didukung koalisi partai nasional, menunjukkan kontinuitas dinasti meski ada reformasi pilkada.

3.2 Terbentuknya Dinasti Politik

Dinasti politik bukan sesuatu fenomena yang baru karena bangsa Indonesia memiliki akar budaya feodal sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat Indonesia masih menjadi kerajaan- kerajaan dan rakyat tunduk terhadap apapun keputusan atau kebijakan raja. Dinasti politik merupakan sistem

memproduksi kembali kekuasaan yang lampau dengan memfungsikan keturunan dan darah dari dan hanya segelintir orang saja.

Lahirnya politik yang berbasis kekerabatan diatas sebagai salah satu implikasi dari keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan peraturan larangan bagi calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik untuk maju. Terdapat beberapa kajian terkait praktek politik dinasti dimana politik dinasti sebagai gambaran dari pola distribusi kekuasaan keluarga. Politik dinasti juga sebagai strategi untuk menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan dan menempatkan kerabat dalam posisi strategis.

Dinasti keluarga secara desing juga memberikan gambaran pada pola Pemerintah bayangan yang dikemukakan oleh teori Agustino dan berbeda pandangan dengan teori Reno yang lebih menekankan pada pemerintah yang terbentuk diakibatkan Pemerintah formal lemah (Akbar & Purnomo, 2019). Kasus dinasti Ratu Atut Chosiyah tidak menggambarkan. lemahnya pemerintahan formal, namun lebih pada kemampuan politik keluarga untuk hadir dalam kontestasi dengan dukungan Golkar sebagai partai politik. Menurut Agustino, pemerintah bayangan terbentuk ketika menyatunya aliansi yang bersifat simbiosis mutualisme antara Kepala Daerah, Pengusaha, dan Bos Lokal. Dalam kasus Ratu Atut Chosiyah, simbiosis mutualisme tergambar.

Dalam kerjasama yang menguntungkan antara kandidat dan Golkar sebagai parpol pengusung. Pola ketiga aliansi diatas semakin kuat apabila calon menang dan aliansi ini menentukan seluruh proyek pemerintah/negara bukan dinas yang bersangkutan (Bathoro; 2014).

Dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten membangun sejarah baru, dinasti ini terbangun sejak pemekaran Provinsi Banten dari Jawa Barat yang aktor politiknya ialah Tubagus Chasan Shohib (orang kuat lokal/bos lokal) sang "Jawara Banten" yang sudah lama mengendalikan politik di Banten. Ia termasuk tokoh sentral yang memiliki pengaruh kuat dalam mendorong pemekaran tersebut. Ketika di masa orde baru, ia memiliki koneksi politik terhadap militer dan elit Golkar. Ia juga menjadi penyokong kebutuhan logistik terhadap Kodam VI Siliwangi dan kaki tangan Kodam VI Siliwangi di Banten untuk menjaga stabilitas. politik disana, karena itu Chasan Shohib diberi keistimewaan dan proyek kontruksi pemerintah. Dari sini ia membentuk perusahaan bernama PT. Ciomas Raya (Perusahaan terbesar di Banten) (Sukri; 2020).

Setelah Banten terbentuk tahun 2000, kemudian Tubagus Chasan Shohib mengatur secara perlahan bangunan dinasti dengan mengantarkan Ratu Atut Chosiyah (anak perempuan kandung) menjabat Wakil Gubernur Banten 2001-2006 dan Gubernur Banten 2007-2012/2012-2017. Selama menjadi Gubernur, Ratu Atut sangat rapi menjalankan peran politiknya dengan menempatkan suami, anak, menantu, ipar, adik kandung ke dalam posisi strategis di pemerintahan lokal dan nasional (eksekutif/legislatif). Adapun dinasti keluarga Atut di Eksekutif dan Legislatif.

3. 3 Hegemoni selama Reformasi

Hegemoni adalah dominasi atau kendali, terutama dalam hal politik, ekonomi, dan budaya, yang dimiliki oleh satu kelompok atau negara atas kelompok lain. Sedangkan Hegemoni berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Setelah reformasi, hegemoni di Banten hingga kini ditandai oleh dominasi dinasti politik keluarga Atut Chosiyah, yang bermula dari kekuatan lokal Tubagus Chasan Sohib (jawara dan penyedia logistik). Hegemoni ini terus berlanjut dan bertahan lebih dari 20 tahun melalui kontrol atas posisi politik strategis, dukungan partai politik, dan pengaruh ulama-jawara, meskipun sempat terjadi penurunan karena koalisi oposisi yang kuat dan masyarakat yang kritis pasca-Pilkada 2024. Karena itu, dampak dari hegemoni ini menyebabkan pembangunan yang tidak merata- ketidakadilan sosial-ekonomi yang tidak seimbang.

Masyarakat bawah (petani, nelayan) minim akses, sementara keluarga Atut kaya raya. Ini mirip teori Gramsci: Hegemoni bukan cuma paksaan, tapi "penerimaan" masyarakat karena pengaruh sosial (Atut sering bagi sembako atau bangun masjid).

Perkembangan Terkini: Penurunan Dominasi: Pilkada Banten 2024 menjadi titik balik, menandai penurunan tajam dominasi keluarga Atut, tercermin dari kegagalan kandidat mereka dalam kontestasi politik, menurut Ensiklopedia of Journal. Munculnya Dinasti Baru: Selain keluarga Atut, muncul juga dinasti baru seperti keluarga Dimiyati (Bupati Pandeglang sebelumnya) yang juga berhasil mengukuhkan kekuasaannya melalui familisme, Perubahan Preferensi Masyarakat: Pergeseran ini menunjukkan perubahan dalam preferensi politik masyarakat Banten, yang sebelumnya cenderung terikat pada hubungan patron-klien dan loyalitas kultural terhadap keluarga penguasa.

4. KESIMPULAN

Kesimpulannya, perkembangan politik lokal menunjukkan bahwa pemekaran wilayah pada tahun 2000 bukan hanya hasil tuntutan administratif tetapi juga perwujudan historis masyarakat Banten dalam terbentuknya provinsi Banten. Dalam pemekaran ini, ada beberapa tokoh yang menjadi pelopor seperti Tubagus Chasan sohib, ironisnya pemekaran justru melahirkan kekuatan politik baru di tingkat lokal untuk mendominasi pemerintahan.

Setelah menjadi provinsi baru, Banten mengalami dinamika politik yang berkembang dengan sangat cepat sehingga munculnya dinasti politik yaitu Dinasti Ratu Atut Chosiyah. Ia menjadi contoh paling menonjol bagaimana menempatkan keluarga dan pengikutnya mendominasi struktur kekuasaan lokal, didukung oleh partai politik dan jaringan patronase yang kuat dan menggambarkan "pemerintahan bayangan". Sehingga fenomena tersebut menciptakan hegemoni politik yang berlangsung selama dua dekade. Dinasti Atut melemah setelah pilkada 2024 ditandai dengan masyarakat yang semakin kritis. Meski demikian fenomena dinasti politik tidak sepenuhnya menghilang, politik dinasti tetapi berlanjut dengan. munculnya dinasti baru. Karena itu, mengendalikan sumber daya politik juga ekonomi menjadi ciri khas dinamika kekuasaan di Banten hingga sat ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Sukri, M. A. (2020). Dinasti politik di Banten: Familisme, strategi politik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190.
- Isnanto, B. A. (2023). Hegemoni adalah dominasi, kekuasaan, ini pengertian, jenis dan contohnya. DetikEdu.
- Hainorrahman, & Sholihin, N. (2024). Dinamika politik Banten 2024. *Times Indonesia*. Kompas.com. (2021). Sejarah Provinsi Banten. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/30/200255179/sejarah-provinsi-banten>
- Bantenologi Journal. (n.d.). Artikel Kawalu. <https://journal.bantenologi.id/index.php/kawalu/article/view/13>
- Universitas Diponegoro. (n.d.). JSCL Article. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jscl/article/view/16122/pdf>
- UIN Raden Intan Lampung. (n.d.). Jawi Journal Article. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi/article/view/3770/2593>

Univet Bantara. (n.d.). Keraton Journal Article.
<https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/keraton/article/view/4218>
STAHN Mpu Kuturan. (n.d.). Jurnal STAHN. <http://journal.stahnmpukuturan.ac.id> HK
Publishing. (n.d.). Official Website. <https://hk-publishing.id>